

EVALUASI PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK TERLANTAR (PKSAT) DI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA) MADANI BANTEN

Siti Nurul Hamidah¹, Uzieka Arsiya Rosadha², Ari Alfiansyah³ Abdul Hafidz Sufiyana⁴, Mutamimatussifah⁵

¹Relawan Rumah Edukasi dan Literasi Al Qur'an (RELIQ), Kota Serang-Banten, nurulhamidah451@gmail.com

²Mahasiswa Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam UIN SMH Banten, uziekarosadha@gmail.com

³Mahasiswa Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam UIN SMH Banten, arialfiansyah824@gmail.com

⁴Mahasiswa Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam UIN SMH Banten, hafizdsufiyana00@gmail.com

⁵Mahasiswa Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam UIN SMH Banten, mutamiiitami@gmail.com

Corresponding author:

E-mail: nurulhamidah451@gmail.com

Abstract

The Social Welfare Program for Displaced Children (PKSAT) is a program created to address the problems of displaced children. One of the institutions that implement the PKSAT program is the Children's Social Welfare Institute (LKSA) Madani Banten through religious programs. The purpose of this research is to determine the evaluation of PKSAT program using CIPP evaluation model (Context, Input, Process, Product). The research method used is a descriptive qualitative approach. Cipp program evaluation includes (1) context evaluation consisting of background, objectives and needs analysis, (2) input evaluation, consisting of 4 aspects, namely implementing, budget allocation, targets, facilities and infrastructure, (3) Evaluation Process, which is divided into 4 parts, namely: Planning and socialization, implementation, monitoring and evaluation of programs, (4) Product Evaluation, which consists of program results. The results of the evaluation research showed that the program implemented in LKSA Madani can be achieved well despite constraints in the program budget.

Keywords: *Abandoned children; social welfare; evaluation program.*

A. PENDAHULUAN

Dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia dapat dilihat dari banyaknya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebagai sebuah indikator yang mencerminkan ketidakberhasilan program peningkatan kesejahteraan sosial yang dibuat. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan atau gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, dan bencana alam maupun bencana sosial (Fadilah, 2011). Salah satu yang menjadi perhatian dari kelompok PMKS adalah anak terlantar, yang saat ini semakin meningkat jumlahnya.

Anak terlantar menjadi pusat perhatian dalam konteks kesejahteraan sosial anak. Perhatian terhadap kesejahteraan anak merupakan hal utama karena keberadaan anak merupakan sesuatu yang sangat berarti. Dimana anak adalah pribadi yang memiliki peranan strategis dalam mengemban tanggung jawab masa depan bangsa (Sulistiani, 2015). Pada konteks kesejahteraan sosial anak, permasalahannya adalah belum terpenuhinya hak-hak dasar anak seperti hak sipil dan kebebasan fundamental, kesehatan, gizi, air dan sanitasi lingkungan dan pendidikan. Dalam konteks pengasuhan anak, permasalahan dilihat dari pelaksanaan kewajiban orang tua atau orang tua pengganti dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dalam pengasuhan anak. Sedangkan dalam isu perlindungan anak yaitu belum terpenuhinya hak-hak anak untuk memperoleh perlindungan dari pihak-pihak yang berkewajiban melindungi anak seperti keluarga, masyarakat, atau lembaga perlindungan anak (Noorrizki, Sa'id,

Mantara, Srinanda, & Azahro, 2020). Permasalahan anak menjadi perhatian besar sejak lama.

Masalah keterlantaran yang dialami oleh anak-anak semakin meningkat. Keterlambatan terjadi karena kelalaian dan atau ketidakmampuan orang tua dan atau keluarga melaksanakan kewajibannya, sehingga kebutuhan jasmaniah, rohaniah maupun sosial mereka tidak terpenuhi secara wajar. Masalah keterlantaran semakin nampak dalam situasi terbatasnya atau minimnya ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh keluarga dan masyarakat untuk mengatasi permasalahan sosial. Padahal, upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan. Oleh Karena itu pemerintah melalui Kementerian Sosial membuat program Program Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar (PKSAT) yang dilakukan oleh seluruh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di seluruh Indonesia. Sehingga pentingnya mengetahui bagaimana hasil dari program PKSAT yang sudah dijalankan, artinya perlunya evaluasi untuk mengetahui keberhasilan serta hambatan yang ada.

Dalam rangka mengetahui efektivitas Program Kesejahteraan sosial Anak (PKSA) khususnya pada anak terlantar atau yang biasa disebut Program Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar (PKSAT) yang telah dilaksanakan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Madani Banten selama ini, maka perlu dilakukannya evaluasi untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk perbaikan program-program pada masayang akan datang. Dengan demikian penelitian ini penting untuk dilakukan, adapun rumusan masalahnya adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan Program Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar (PKSAT) di LKSA Madani Banten?, (2) Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar

(PKSAT) di LKSA Madani Banten?, dan (3) Bagaimana evaluasi terhadap Program Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar (PKSAT) di LKSA Madani Banten?

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi terhadap Program Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar (PKSAT) yang dilakukan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Madani Banten. Secara khusus tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Program Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar di LKSA Madani Banten, (2) Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan Program Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar di LKSA Madani Banten, dan (3) Untuk Mengevaluasi Program Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar di LKSA Madani Banten. Penelitian ini dapat dijadikan salah satu bahan rujukan dalam pengembangan karya-karya ilmiah bagi setiap akademis, baik dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten atau pihak-pihak yang lainnya. Selain itu, penelitian ini dapat menambah wawasan serta menjadi bahan evaluasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Madani, dan masyarakat pada umumnya.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Metode Evaluasi *Context Input Process Product* (CIPP)

Pada penelitian ini kami akan menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) dari Daniel Stufflebeams. Metode Evaluasi *Context Input Process Product* (CIPP) dipilih sebagai salah satu metode dalam evaluasi program layanan informasi. *Context Input Process Product* (CIPP) menurut Sumiharyati & Arikunto (2019) adalah model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem. Sasaran model evaluasi *Context Input Process*

Product (CIPP) memiliki empat komponen dasar dari proses sebuah program kegiatan. Komponen tersebut antara lain evaluasi terhadap konteks (*context evaluation*), evaluasi terhadap masukan (*input evaluation*), evaluasi terhadap proses (*process evaluation*), evaluasi terhadap hasil (*product evaluation*) (Mathison, 2013).

Komponen Model evaluasi CIPP dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Evaluasi konteks juga mencakup analisis masalah yang berkaitan dengan lingkungan program atau latar belakang sosial ekonomi yang dikumpulkan digunakan sebagai dasar dalam pertimbangan program. Stufflebeam juga mengatakan bahwa evaluasi konteks sebagai suatu fokus institusi yang menjelaskan peluang dalam menilai kebutuhan. Suatu kebutuhan dirumuskan sebagai suatu kesenjangan (*discrepancy view*) kondisi nyata (*reality*) dengan kondisi yang diharapkan (*ideality*). Dengan kata lain evaluasi konteks berhubungan dengan analisis masalah kekuatan dan kelemahan dari obyek tertentu yang akan atau sedang berjalan. Evaluasi konteks member informasi bagi pengambil keputusan dalam perencanaan suatu program yang akan dilakukan. Selain itu, konteks juga bermaksud bagaimana rasionalnya suatu program (Yusuf Sukman, 2017).
- b. Evaluasi input meliputi analisis personal yang berhubungan dengan bagaimana sumber-sumber yang tersedia, strategi yang harus dipertimbangkan untuk mencapai suatu program. Mengidentifikasi dan menilai kapabilitas sistem, alternative strategi desain prosedur untuk strategi implementasi. Evaluasi masukan bermanfaat untuk membimbing pemilihan strategi dalam menspesifikasikan rancangan procedural. Informasi dan data yang terkumpul dapat digunakan untuk menentukan sumber dan strategi dalam keterbatasan yang ada.

- c. Evaluasi proses berorientasi pada seberapa jauh kegiatan program yang terlaksana sesuai dengan rencana. Evaluasi proses melibatkan aspek “apa” kegiatannya, “siapa” penanggungjawab program, dan “kapan” kegiatan selesai. Implementasi dari evaluasi proses ini dapat melalui *pre-test post-test*, observasi, *self-report* perbaikan tingkah laku, *self-study*, studi kasus, pengukuran sosiometri, data kehadiran dan kedisiplinan, serta hambatan-hambatan yang ditemui.
- d. Evaluasi produk yaitu evaluasi yang bertujuan untuk mengukur, menginterpretasikan, dan menilai capaian program. Selain itu, untuk menilai luaran atau *outcome* dan menghubungkan hal tersebut secara objektif dengan konteks, input, dan proses (Mathison, 2013).

2. Kelompok Anak Terlantar

Mengutip dari (Syafar, 2018:6) kelompok anak terlantar adalah bagian dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yaitu anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orangtua atau keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua atau keluarga.

Anak terlantar masuk dalam klasifikasi masalah sosial non-patologis yang mengacu pada masalah yang bersifat penyakit sehingga relatif lebih mudah mengatasinya. Tetapi jika masalah ini tidak segera ditangani dengan seksama masalah ini dapat menjadi masalah sosial yang bersifat patologis yang sulit untuk dipecahkan dan berhubungan dengan kehidupan masyarakat itu sendiri sebagaimana (Sandi, 2016:155) menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termaksud anak yang masih dalam kandungan. Adapun

ciri-ciri anak terlantar adalah sebagai berikut:

- a) Laki-laki atau perempuan berusia 5-18 tahun
- b) Anak yatim piatu, baik masih mempunyai kedua orang tua
- c) Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar
- d) Anak yang terlahir dari pemerkosaan, tidak ada yang mengurus dan tidak mendapatkan pendidikan.

Banyak Anak yang diterlantarkan oleh orang tua disebabkan oleh berbagai alasan, terutama masalah kemiskinan dan kurangnya tanggung jawab orangtua terhadap pola pengasuhan dan perawatan anak, adanya kecenderungan orangtua melepaskan tanggung jawab pengasuhan atas anak mereka ketika beban ekonomi menghimpit. Mengutip dari (Sandi, 2016:155) terdapat beberapa faktor penyebab anak terlantar yaitu:

- a) Faktor Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. dimana keluarga ini merupakan faktor yang paling penting yang sangat berperan dalam pola dasar anak. kelalaian orang tua terhadap anak sehingga anak merasa ditelantarkan. anak-anak sebetulnya hanya membutuhkan perlindungan, tetapi juga perlindungan orang tuanya untuk tumbuh berkembang secara wajar.

- b) Faktor Pendidikan

Di lingkungan masyarakat miskin pendidikan cenderung diterlantarkan karena krisis kepercayaan pendidikan dan juga ketidakadaan biaya untuk mendapatkan pendidikan.

c) Faktor sosial, politik dan ekonomi

Akibat situasi krisis ekonomi yang tak kunjung usai, pemerintah mau tidak mau memang harus menyisihkan anggaran untuk membayar utang dan memperbaiki kinerja perekonomian jauh lebih banyak daripada anggaran yang disediakan untuk fasilitas kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial anak.

d) Kelahiran diluar nikah

Seorang anak yang kelahirannya tidak dikehendaki pada umumnya sangat rawan untuk ditelantarkan dan bahkan diperlakukan salah (child abuse). pada tingkat yang ekstrem perilaku penelantaran anak bisa berupa tindakan pembuangan anak untuk menutupi aib atau karena ketidaksanggupan orang tua untuk melahirkan dan memelihara anaknya secara wajar.

Perlindungan untuk anak terlantar dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat (1) bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak terlantar. Dan UU No. 23 Tahun 2002 pasal 23 ayat (1) bahwa “Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak” (Firadika, 2017).

3. Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)

Pada tahun 2009 Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak mulai mengembangkan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) melalui kegiatan uji coba penanganan anak jalanan di lima wilayah yaitu Jawa Barat, DKI

Jakarta, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Yogyakarta. PKSA dikuatkan melalui kebijakan pemerintah yaitu keluarnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional, dimana diperlukan penyempurnaan program bantuan sosial berbasis keluarga khususnya bidang kesejahteraan sosial anak balita terlantar, anak terlantar, anak jalanan, anak dengan disabilitas, anak yang berhadapan dengan hukum. Selanjutnya PKSA dikuatkan lagi dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, yang menetapkan PKSA sebagai program prioritas nasional salah satunya PKS-Anak Terlantar (PKSAT).

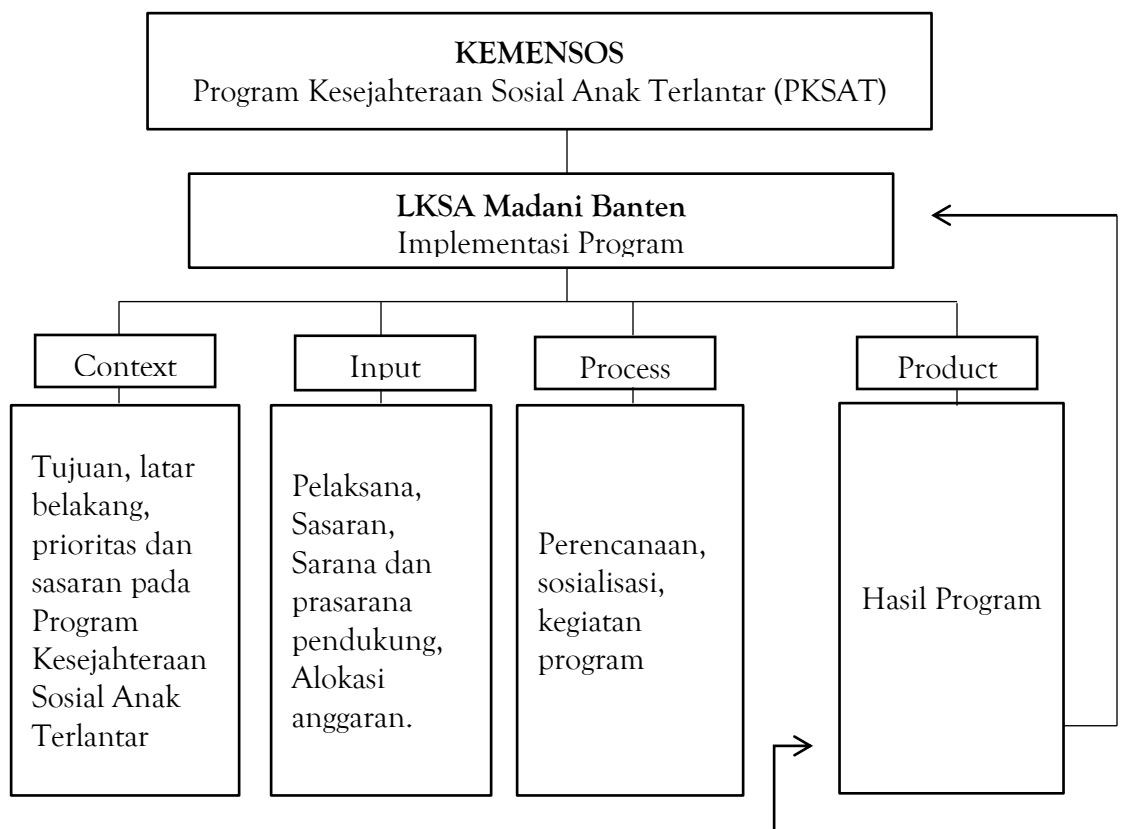
Kementrian Sosial melalui Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), sejak tahun 2005 sampai 2013, rata-rata baru bisa menangani 3,7% atau sekitar 170.000 anak/tahun. Pada tahun 1990 Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keppres 36/1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 dimana substansi inti dari KHA adalah adanya hak asasi yang dimiliki anak dan ada tanggung jawab Negara-Pemerintah-Masyarakat-dan Orang tua untuk kepentingan terbaik bagi anak secara optimal. Kemudian KHA dikuatkan dengan terbitnya Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban Anak, serta kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Di samping itu juga diatur tentang kuasa asuh, perwalian, pengasuhan dan pengangkatan anak, serta penyelenggaraan perlindungan (Putri, Mulyana, & Resnawaty, 2015).

C. METODE

1. Metode Evaluasi Penelitian

Dalam penelitian ini model evaluasi yang digunakan adalah Model Evaluasi

CIPP (*Context, Input, Process, Product*). Metode ini bertitik pada pandangan bahwa keberhasilan program kesejahteraan sosial anak terlantar dipengaruhi beberapa faktor, seperti lingkungan, pendidikan, karakter anak, tujuan program, prosedur dan mekanisme pelaksanaan program itu sendiri. Maka model evaluasi penelitian yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 1 tentang Rancangan Model Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar (PKSAT) berikut



Gambar 1.
Rancangan Model Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar (PKSAT)
(Sumber : Penulis, 2020)

Dari gambar desain penelitian di atas mengenai Program Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar di LKSA Madani Banten, dapat kita lihat keefektifan pelaksanaan pada program tersebut. Pertama, menjelaskan bagaimana evaluasi pada *context*. Dapat dilihat dengan identifikasi terhadap kesesuaian pada tujuan, latar belakang, prioritas pada Program Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar dengan kondisi nyata yang ada di lapangan. Kemudian yang selanjutnya adalah *input* program dengan mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan pada program, Selanjutnya yang ketiga yaitu mengenai *process* program dengan adanya perencanaan, sosialisasi dan kegiatan program. Kemudian yang terakhir yaitu mencapai evaluasi *product* berupa laporan kegiatan dan hasil yang didapat dalam Program Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar (PKSAT) di LKSA Madani Banten.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Madani Banten. LKSA Madani Banten secara administratif terletak di kota Serang, Lingkungan Cipare Jaya, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 021, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang Provinsi Banten. Lokasi tersebut dipilih karena Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Madani melakukan pembinaan keagamaan terhadap anak terlantar, anak duafa serta fakir miskin dalam mendukung terwujudnya PKSA di Banten. Selain itu pelaksanaan program pembinaan, pelayanan dan rehabilitasi terhadap anak terlantar di LKSA Madani Banten sangat perlu dievaluasi, sehingga dapat diketahui bagaimana tingkat keberhasilan program-program tersebut dalam mencapai tujuannya.

3. Instrumen Penelitian

Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengukur data yang hendak dikumpulkan. Instrumen pengumpulan data ini pada dasarnya tidak terlepas dari metode pengumpulan data. Bila metode pengumpulan datanya adalah *depth interview* (wawancara mendalam), instrumennya adalah pedoman wawancara terbuka/tidak terstruktur. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa daftar pertanyaan. Dengan demikian instrument tersebut digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa daftar pertanyaan untuk diajukan kepada informan. Daftar pertanyaan tersebut kemudian dijabarkan dalam sebuah wawancara mendalam dengan informan, peneliti mengumpulkan informasi dari berbagai informan melalui interaksi verbal. Sebelumnya peneliti menyiapkan daftar pertanyaan terstruktur yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian peneliti bertemu dengan narasumber dan mengajukan pertanyaan. Adapun struktur pedoman wawancara bergantung pada kebutuhan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk pada suatu cara sehingga bisa diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi dan sebagainya. Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Untuk mengumpulkan data dari sumber informasi dari informan, ada dua macam instrument bantuan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: (1) panduan atau pedoman wawancara mendalam. Ini adalah suatu

tulisan singkat yang berisikan daftar informasi yang perlu dikumpulkan. Pertanyaan-pertanyaan bersifat umum yang memerlukan jawaban panjang, bukan jawaban ya atau tidak; (2) alat rekaman. Peneliti menggunakan alat perekam seperti gawai dan kamera video untuk merekam hasil wawancara. Alat perekam dapat dipergunakan apabila peneliti mengalami kesulitan untuk mencatat hasil wawancara.

5. Metode Analisis Data

Analisis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, akurat dan faktual mengenai fakta-fakta yang ada, serta sifat-sifat hubungan antar fenomena yang diselidiki dari subyek penelitian. Melukiskan suatu fenomena atau keadaan berdasarkan kenyataan yang ditemui di lapangan mengenai kehidupan anak terlantar. Pertama mencari tahu terlebih dahulu latar belakang anak terlantar, baik yang menetap tinggal di panti maupun yang hanya singgah di panti, yaitu berupa biodata atau profil anak terlantar, kemudian menggali permasalahan-permasalahan anak terlantar kepada informan dengan cara mewawancarai informan terkait. Setelah itu, informasi atau data-data yang telah didapatkan peneliti di lapangan diolah dan disajikan dalam bentuk tulisan sehingga bisa ditarik sebuah kesimpulan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Paparan Data

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Madani melakukan pembinaan keagamaan terhadap anak terlantar, dalam mendukung dan terwujudnya Program Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar (PKSAT) di Banten. Program

keagamaan tersebut dilakukan melalui Pondok Pesantren Hilmatul Madani Banten yang merupakan bagian dan pendukung dalam pembinaan anak di LKSA Madani Banten dan merupakan Pondok Pesantren yang menampung anak-anak terlantar, duaafa, fakir miskin yang didirikan dalam naungan LKSA Madani Banten. Program keagamaan ini menjadi program utama yang dilakukan di LKSA Madani Banten. Program keagamaan tersebut diantaranya, pengajaran baca tulis huruf hijaiyah bagi anak terlantar yang ditemukan atau ditampung yang sama sekali tidak bisa mengaji, intensif Alquran untuk yang sudah mengaji Alquran, mengaji kitab dan kegiatan mandiri bersama dalam rangka melatih kemandirian anak dengan memasak bersama untuk makanan buka puasa baik wajib maupun sunnah dan hafalan surat-surat pendek.

2. Pembahasan

Untuk mengetahui program yang telah dipaparkan diatas, dapat dikatakan berhasil atau tidak maka perlu dilakukannya evaluasi. Evaluasi yang akan digunakan akan memakai model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*).

a. Evaluasi *Context*

Evaluasi *context* pada proses implementasi program keagamaan terdiri dari tiga bagian, yaitu latar belakang, tujuan dan analisis program. Berdasarkan data yang didapatkan diketahui bahwa, program keagamaan yang secara konsisten terus berjalan di LKSA Madani Banten adalah pengajaran mengaji anak terlantar, hal ini dimaksudkan untuk mendidik dan menumbuhkan nilai-nilai agama sekaligus pendampingan keagaamaan untuk anak-anak terlantar. Dalam proses implementasi program, anak-anak terlantar baik yang singgah maupun menetap atau tinggal dalam naungan LKSA Madani Banten dibina dalam Pondok Pesantren Hilmatul Madani, anak terlantar tinggal dengan santri yang ada di Pondok Pesantren, mengaji bersama dan aktivitas kegiatan yang mengikuti

kegiatan santri, namun anak-anak terlantar dibina dan didampingi lebih intens baik untuk menyembuhkan trauma, kebiasaan buruk seperti mencuri dan berkata kasar.

Program keagamaan tersebut merupakan sebuah program pemberdayaan untuk anak terlantar, yang artinya seluruh kegiatan dan proses pemberdayaan terhadap anak-anak terlantar menjadi sebuah wadah dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, tujuan dari program ini adalah agar anak terlantar yang tadinya tidak bisa membaca atau menulis huruf hijaiyah, menjadi bisa menulis dan membaca huruf hijaiyah, dengan adanya program tersebut anak-anak terlantar mulai bisa membaca Alquran dan mengenal beberapa huruf, selain itu secara tidak langsung program ini untuk menumbuhkan jiwa spritual anak-anak terlantar. LKSA Madani berharap program ini dapat dijadikan solusi dalam melakukan pemberdayaan PMKS khususnya pemberdayaan anak-anak terlantar berbasis pesantren dalam partisipasi mendukung Program Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar (PKSAT). Anak terlantar bukan hanya harus sejahtera dalam penghidupan seperti makan dan minum, tetapi dalam hal berekspresi, hak pendidikan dan pengajaran baik formal maupun non-formal harus mereka dapatkan, salah satunya pendidikan dan pengajaran dalam bidang keagamaan sebagaimana program di LKSA Madani Banten.

Berdasarkan hasil penelitian, program keagamaan yang dilakukan terhadap anak terlantar di LKSA Madani sesuai kebutuhan dengan anak-anak terlantar. Di mana anak-anak terlantar rata-rata minim pengetahuan keagamaan, buta huruf hijaiyah, tidak mengenal Alquran dan dengan program tersebut dapat merubah kebiasaan buruk anak terlantar, baik sifat maupun sikap. Dalam implementasi program ini, peran anak juga menentukan keberhasilan pengimplementasian program keagamaan untuk anak terlantar, di mana perlunya hubungan dan kerja

sama yang baik antara anak dengan pengurus LKSA Madani Banten. Anak mengikuti program yang ada, dan LKSA Madani Banten memberi fasilitas pendukung, seperti Alquran ataupun Iqra serta tempat tinggal untuk anak terlantar yang mau menetap di sana. Dalam hal ini berarti program keagamaan ini tidak akan berjalan jika anak tidak mau merubah kebiasaan buruk, sifat dan sikap serta tidak mau belajar di LKSA Madani Banten.

b. Evaluasi Input

Dalam penelitian evaluasi *input* mengenai implementasi program keagamaan. LKSA Madani Banten memiliki peran sentral dalam pemberdayaan anak terlantar dan pendampingannya. Dalam mendukung program yang dilaksanakan, LKSA Madani Banten tidaklah berdiri sendiri, artinya dalam menunjang kebutuhan anak LKSA Madani Banten dibantu oleh pihak lain, adapun pihak lain yang dimaksud adalah donatur. Donatur yang dimaksud bukanlah donatur tetap, tetapi orang-orang yang berkesempatan membantu, ingin membantu dan tergerak hatinya. LKSA Madani menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang dapat menunjang operasional dan berjalannya program. Bantuan dari donatur yang didapatkan LKSA Madani Banten diantaranya, uang dalam jumlah tertentu, kasur tidur, Alquran, Iqra, beras, minyak dan kebutuhan lainnya, yang kebutuhan tersebut tidak didapatkan secara rutin.

Jalanan kerja sama ini dimaksudkan LKSA Madani sebagai penunjang atau penopang bagi LKSA Madani Banten, sebagaimana LKSA Madani bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan anak akan pendidikan, pangan dan tempat tinggal, jika hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah tentunya akan sulit karena belum adanya regulasi pasti bantuan dana, atau pun kendala lain. Selain itu, dalam menunjang kesehatan anak dalam mengikuti program keagamaan.

Adapun pembina dan pengajar di LKSA Madani Banten terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, tenaga pengajar baik dari relawan maupun dari pengurus LKSA Madani Banten. LKSA Madani berperan dalam mandiri dan berdayanya anak terlantar khususnya dalam bidang keagamaan, di sisi lain LKSA Madani juga bertanggungjawab untuk meningkatkan kualitas para pengurus dan pengajarnya, karena pengurus dan pengajar merupakan aktor penting yang memiliki tanggungjawab dalam memelihara dan membentuk karakter, sikap, sifat dan kemandirian anak terlantar. Pengurus dapat dikatakan sebagai gerbang keberhasilan untuk anak-anak terlantar agar berdaya dan mandiri, oleh karena itu LKSA Madani juga memberikan insentif berupa “hak amil” bagi pengurus. Diharapkan para pengurus, baik ketua, pengajar ataupun lainnya konsisten melaksanakan kewajiban dan tugasnya masing-masing serta bertanggung jawab terhadap apa yang telah diamanahkannya.

Pada *variable* program, aspek yang ada sudah terpenuhi baik terpenuhinya pelayanan yang diberikan dan fasilitas yang memadai bagi anak-anak terlantar. Sedangkan hambatan yang ada yaitu tidak adanya donator tetap sehingga pendanaan program tidak tentu jumlahnya. Sarana dan fasilitas cukup memadai dan tempat tersebut dalam hal ini LKSA Madani sudah memiliki surat izin operasional sehingga jelas keberadaannya. Adapun dana yang digulirkan untuk LKSA Madani Banten pada pandemi Covid-19 tidaklah cukup, LKSA Madani Banten menjelaskan bahwa permasalahan dana dan bantuan yang masih kurang. Misalnya kegiatan seperti bantuan yang seharusnya setiap tahun anak terlantar mendapatkan uang sebesar Rp 3.000.000,- per tahun, tetapi pada pandemi Covid-19 hanya mendapatkan uang sebesar Rp 1.000.000,- per tahun, menurut menurut pihak LKSA Madani Banten jumlah tersebut masih kurang, mengingat kebutuhan anak yang tidak sedikit.

c. Evaluasi *Process*

Kegiatan keagamaan yang dilakukan di LKSA Madani Banten yaitu pembelajaran mengaji baik Alquran, Iqra maupun kitab, menghafal surah dan doa-doa, praktik shalat dan mandiri bersama melalui kegiatan memasak bersama dalam rangka melatih kemandirian anak untuk memasak makanan mereka sehari-hari maupun makanan buka puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Sebagaimana Program Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar (PKSAT) yang dilakukan oleh LKSA Madani berbasis pondok pesantren. Adapun kegiatan keagamaan yang harus diikuti oleh anak terlantar di LKSA Madani dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1.
kegiatan keagamaan rutin di LKSA Madani Tahun 2020

Kegiatan Keagamaan	Waktu
<i>Talaqqi</i>	Ba'da subuh
<i>Safinah</i>	Ba'da ashar pada hari senin, selasa dan rabu
Memperlancar bacaan Alquran/Iqra/ hafalan surat-surat pendek	Ba'da Maghrib setiap malam senin, selasa, rabu, kamis dan Jumat
Seni Baca Quran (SBQ)	Ba'da Isya malam kamis dan malam sabtu
<i>Sullamut Taufik</i>	Ba'da isya malam selasa
<i>Jurumiah</i>	Ba'da Isya malam selasa
<i>Minhajul Qowim</i>	Ba'da Isya malam minggu dan malam senin
Dala'il	Ba'da maghrib malam sabtu dan malam minggu
Yasinan	Ba'da Maghrib malam jumat
Marhaban	Ba'da Isya malam jumat

Sumber: Data Primer

Pada Tabel 1 di atas dapat dilihat aktivitas kegiatan keagamaan yang diikuti oleh anak terlantar baik yang singgah sementara ataupun yang menetap di LKSA Madani Banten. Dalam proses implementasi program dibutuhkan aturan dalam mendisiplinkan anak terlantar secara perlahan agar mereka terbiasa, sehingga permasalahan awal pada proses implementasi program keagamaan di LKSA Madani adalah rendahnya kesadaran anak, anak berkata kasar karena belum terbiasa untuk berkata hal-hal yang baik, anak melakukan kegiatan karena terpaksa. Dapat dikatakan bahwa pada awal mula anak terlantar mengikuti program keagamaan di LKSA Madani Banten, mereka memiliki partisipasi yang rendah.

Hal tersebut merupakan tantangan yang besar untuk LKSA Madani Banten, namun pihak LKSA Madani meyakini bahwa sebuah keterpaksaan yang baik jika dilakukan berulang akan membentuk kebiasaan yang baik, yang pada akhirnya akan membentuk pribadi baru yang mandiri untuk anak terlantar. Anak terlantar di LKSA Madani diberikan hak untuk belajar, untuk berekspresi dan dipenuhi kebutuhan sandang dan pangannya, dilihat dari segi fasilitas LKSA Madani menjadi tempat yang nyaman untuk anak terlantar “berlindung”, namun dalam aspek kedekatan dengan anak, seperti kedekatan emosional, LKSA Madani harus lebih meningkatkan lagi pendekatan dan keterjalinan emosional dengan anak terlantar sehingga program yang dijalankan dapat terlaksana sebagaimana agar tercapainya tujuan program dalam membangun kemandirian anak, perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, dan pemahaman keagamaan yang baik.

Sehingga dapat kita katakan bahwa hambatan proses implementasi program keagamaan di LKSA Madani Banten berasal dari faktor di dalam dan di luar. Faktor di dalam adalah terkait kesadaran anak terlantar itu sendiri, apakah dia mampu dan mau berpartisipasi atau tidak, adapun faktor dari luar yaitu terkait

dana, kebutuhan anak yang besar tidak ditunjang dengan jumlah dana yang memadai.

d. Evaluasi *Product*

Evaluasi *product* merupakan evaluasi tahap terakhir dalam model evaluasi CIPP. Dalam evaluasi *product* terkait program keagamaan yang dilakukan di LKSA Madani menunjukkan bahwa program keagamaan ini menjadi program utama dan program berkelanjutan untuk anak-anak terlantar, program ini dalam rangka menjawab “kurangnya” anak terlantar dalam mendapatkan hak pendidikan, pengajaran dan pengetahuan keagamaan. Secara langsung program ini meningkatkan pengetahuan anak terlantar seputar pengetahuan keagamaan, praktik ibadah dari yang awalnya anak terlantar tidak bisa shalat dan mengaji, menjadi bisa shalat dan mengaji, dari yang awalnya anak terlantar tidak tahu surah-surah pendek menjadi tahu dan hafal surah-surah pendek, dan adanya peningkatan kapasitas pengetahuan mereka serta terbentuknya kemandirian anak terlantar.

Program keagamaan ini sebagai bentuk menanamkan nilai-nilai agama memberikan hak pendidikan kepada anak terlantar sebagaimana pada anak umumnya. Berdasarkan penelitian, program keagamaan ini merupakan program berkelanjutan dan jangka panjang dalam melakukan pemberdayaan PMKS khususnya anak terlantar, keberhasilan program ini tidak dapat dilepaskan dari dua sisi, yaitu kesadaran anak terlantar dan peran pengurus LKSA Madani dalam membina anak-anak terlantar. Selain itu, perlu ditingkatkan lagi program-program yang dapat membuat anak-anak terlantar menjadi lebih baik, mandiri, dan berdaya.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan evaluasi program dengan model CIPP program PKSAT di LKSA Madani Banten yaitu dalam program keagamaan dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Evaluasi *Context*, yang terdiri dari 3 bagian, yaitu latar belakang, tujuan dan analisis kebutuhan. Dari semua aspek evaluasi konteks sudah tercapai dan sesuai dengan kebutuhan anak terlantar. 2) Evaluasi *Input*, yang terdiri dari 4 aspek yaitu pelaksana, alokasi anggaran, sasaran, sarana dan prasarana pendukung program. Dari semua aspek tersebut masih ada yang belum maksimal, yaitu terkait anggaran, yang mana anggaran yang dimiliki LKSA Madani Banten terbatas, atau adanya kendala baik dari pusat ataupun lembaga terkait. Selebihnya kebutuhan anak dibantu oleh donatur (3) Evaluasi *Process*, yang terbagi menjadi 4 bagian yaitu: Perencanaan dan sosialisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program. Dari keempat bagian evaluasi *process*, semuanya terlaksana walaupun terdapat kendala terkait anggaran, namun hal tersebut masih bisa diatasi dan diminimalisir (4) Evaluasi *Product*, yaitu terdiri dari hasil program. Tujuan program tersebut telah tercapainya dalam memberdayakan anak terlantar melalui program keagamaan KSAT (Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar) yang dapat menjadikan anak terlantar mandiri, merubah perilaku dan sikap ke arah yang lebih baik, disiplin dan berdaya.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang membantu berjalannya penelitian ini. Terima kasih kepada pengurus LKSA Madani Banten yang telah bekerja sama dalam proses penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadilah, U. (2011). *Analisis penyandang masalah kesejahteraan sosial di indonesia menggunakan metode fuzzy c-mean clustering dan biplot*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Firadika, A. R. (2017). Penanganan Anak Terlantar oleh Dinas Sosial Berdasarkan Pasal 34 UUD Tahun 1945. *SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR*.
- Mathison, S. (2013). Cipp Model (Context, Input, Process, Product). In *Encyclopedia of Evaluation* (Vol. 1, pp. 342–347). <https://doi.org/10.4135/9781412950558.n82>
- Noorrizki, R. D., Sa'id, M., Mantara, A. Y., Srinanda, D. A., & Azahro, C. D. (2020). Pelatihan Keterampilan Sosial di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Putri Muhammadiyah Malang. *PLAKAT (Pelayanan Kepada Masyarakat)*, 2(1), 18. <https://doi.org/10.30872/plakat.v2i1.3819>
- Putri, Y. A., Mulyana, N., & Resnawaty, R. (2015). PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK(PKSA) DALAM MEMENUHI KESEJAHTERAAN ANAK JALANAN. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 57–61. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13256>
- Sandi, I. (2016). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR PADA DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGAH. *Katalogis*, 4(5), 150–160.
- Sulistiani, S. L. (2015). *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Pertama)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sumiharyati, S., & Arikunto, S. (2019). Evaluasi program in-service training guru SMK di BLPT Yogyakarta. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 7(2). <https://doi.org/10.21831/amp.v7i2.26654>
- Syafar, M. (2018, December). IMPLEMENTASI PROGRAM KEBIJAKAN SOSIAL BAGI KELOMPOK PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DI INDONESIA. 1–17. Retrieved from <http://repository.uinbanten.ac.id/6026/>
- Yusuf Sukman, J. (2017). Model Evaluasi Program Dalam Penelitian Evaluasi. *Jurnal Ilmiah Penjas*, 4(1), 9–15.

